



Peranan Program Dana Desa (DD) Dalam Upaya Penanganan Kemiskinan Rumah Tangga Pesisir di Kabupaten Wakatobi

Jamal Mukaddas¹, Ebed Hamri Koodoh², Hasddin^{1*}, Abd. Azis Muthalib³, Asrip Putera³, Mirad⁴, Idham Handa¹

¹Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Lakidende, Indonesia

²Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo, Indonesia

⁴Fakultas Sosial dan Bisnis, Universitas Mandala Waluya, Indonesia

*Korespondensi: hasddinunilaki@gmail.com

Info Artikel

Diterima 12
Desember 2022

Disetujui 10 April
2023

Dipublikasikan 04
Mei 2023

Kata Kunci:
Kemiskinan,
Pesisir, Dana Desa.

© 2023 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Penelitian menganalisis efektivitas serta faktor-faktor pendukung dan penghambat program DD kaitanya dengan kemiskinan pada rumah tangga pesisir di Kabupaten Wakatobi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Desa yang diambil secara purposive yakni desa yang memiliki jumlah keluarga miskin terbanyak di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Informan dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling. Program DD yang diarahkan pada upaya penangan kemiskinan pesisir di Desa Mola Nelayan Bakti "kurang efektif", Desa Komala "cukup efektif", dan Desa Liya Togo "kurang efektif". Faktor yang mendukung efektifitas penggunaan dana desa (DD) dalam penanganan kemiskinan terkait dengan kebijakan (peraturan perundang-undangan) yang jelas dalam memberikan arahan operasional pelaksanaan program, Ketepatsasaran alokasi DD, dan perencanaan program yang tepat. Hasil selanjutnya bahwa hal-hal yang menghambat efektifitas penggunaan DD adalah dari masyarakat itu sendiri diantaranya adalah kebiasaan acuh masyarakat, kurang keterbukaan informasi perencanaan, partisipasi masyarakat (rendah); serta sumber daya manusia didesa yang masih rendah.

Abstract

The research analyzes the effectiveness and the supporting and inhibiting factors of the DD program in relation to poverty in coastal households in Wakatobi Regency. This study uses a qualitative approach. The villages taken purposively were the villages that had the largest number of poor families in the South Wangi-Wangi District. Informants were selected by purposive and snowball sampling. The DD program which is directed at efforts to deal with coastal poverty in Mola Nelayan Bakti Village is "less effective", Komala Village is "fairly effective", and Liya Togo Village is "less effective". Factors that support the effective use of village funds (DD) in handling poverty are related to clear policies (laws and regulations) in providing operational direction for program implementation, targeting DD allocations, and proper program planning. The next result is that the things that hinder the effective use of DD are from the community itself, including

the habit of being indifferent to the community, lack of disclosure of planning information, community participation (low); and human resources in the village are still low.

1. Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dianggap sebagai langkah strategis dan memiliki nilai urgen dalam upaya meningkatkan pembangunan secara merata, dimulai dari desa serta peningkatan peran serta masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kinerja pembangunan. Nilai penting dari UU desa bantuan finansial melalui dana desa oleh Pemerintah kepada pemerintah desa di seluruh Indonesia. Pada pasal 72 menyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Galasso & Ravallion (2005) mengatakan bahwa kebijakan anggaran daerah sebagai bentuk dari desentralisasi kebijakannya yang didukung dengan capaian dan target tertentu.

Dana Desa (DD) adalah Dana yang diperuntukan bagi desa-desa di Indonesia dari APBN. Dilakukan melalui ditransfer langsung sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Mukaddas et al., 2021; dan Karimah et al., 2014). Sasaran utama program DD mengatasi ketimpangan desa-kota terutama mengenai pemerataan pembangunan yang berujung pada penanganan untuk pengentasan kemiskinan. Hal ini berarti bahwa efektivitas dan tidaknya penggunaan dana desa (DD) terletak dari sejauh mana kepentingan masyarakat desa dapat terpenuhi (Amin, 2017). Objek pengelolaan dan penggunaan dana desa adalah untuk mengatasi kemiskinan pada masyarakat desa (Azwardi & Sukanto, 2014)

Kemiskinan rumah tangga miskin pesisir dalam studi ini merujuk dari ketepatan beberapa sumber. Oleh BPS, suatu rumah tangga dikatakan miskin bila mana hanya dapat memenuhi pangan kurang dari 2.100 kalori/kapita/ hari. Kecukupan konsumsi pangan tersebut menggambarkan ekonomi rumah tangga, maka dari aspek ini berkontribusi pada klasifikasi kemiskinan dari sosial ekonomi seperti Pendidikan (tidak bersekolah), rumah berlantai tanah, hingga ketidakmampuan mengakses layanan kesehatan (Roidah, 2016; Mahaeni et al., 2014; Pattinama, 2009; dan Araujo et al., 2008).

Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri mendapat alokasi dana desa setiap tahunnya sekitar 4 % dari total dana desa provinsi. Pada Tahun 2017 dan 2018, Kabupaten Wakatobi mendapat peruntukan dana desa hampir Rp 60 miliar (Mukaddas et al., 2021), atau sekitar Rp 800 juta/desa dari 75 desa yang ada di Kabupaten Wakatobi. Jumlah tersebut meningkat drastis dibanding awal berlakunya yakni tahun 2015 sebesar Rp 14 miliar saja. Sejalan dengan program pemerintah pusat dalam upaya pengentasan kemiskinan pada masyarakat desa, maka dana desa di Kabupaten Wakatobi diharapkan mampu berperan dalam mengentaskan (penurunan) angka kemiskinan sebagai salah satu indikator efektifitas penggunaan dana desa. Kemiskinan di Kabupaten Wakatobi masih tergolong tinggi, jauh dari rata-rata nasional (9%). Tahun tahun 2017 kemiskinan di

Kabupaten Wakatobi sekitar 17 % mengalami peningkatan dibanding tahun tahun 2015 diangka 16% (Mukaddas et al., 2021). Kurung waktu tahun 2012 hingga 2014 kinerja pemerintah juga kurang efektif dalam penurunan angka kemiskinan. Hal ini terlihat dari persentase angka kemiskinan tahun 2014 sebesar 17,4 %, tahun 2013 dan 2012 masing-masing sebesar 15,99 % dan 16,36 %. Fakta ini melahirkan pendugaan bahwa selama program DD berjalan dimungkin belum efektif dalam hal penanganan (pengentasan) kemiskinan, pada saat yang bersamaan, anggaran DD cukup besar dan alokasinya mengalami peningkatan setiap tahun.

Masyarakat miskin di Kabupaten Wakatobi tersebar di wilayah sepanjang pantai (pesisir) khususnya nelayan. Hasil penelitian (Ngadi, 2016) menyebutkan bahwa bahwa masyarakat pesisir di Kabupaten Wakatobi sebagian besar penduduk pendapatan rendah. Salah satu wilayah di Kabupaten Wakatobi yang berpenduduk miskin terbanyak terdapat di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan mencapai 32,96 %. Terdapat tiga (3) desa di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yang memiliki jumlah penduduk miskin sangat tinggi yakni di Desa Mola Nelayan Bakti sebanyak 524 KK atau sekitar 80,86 % dari total rumah tangga 648 KK, Desa Komala sebanyak 256 KK atau sekitar 96 % dari total rumah tangga 267 KK, dan Desa Liya Togo terdapat keluarga miskin sebanyak 626 KK atau sekitar 83,23 % dari total rumah tangga 752 KK. Dengan demikian wilayah pesisir Wangi-Wangi selatan harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam upaya perencanaan pengentasan kemiskinan, minimal mengurangi angka kemiskinan termasuk dalam peruntukan Dana Desa (DD).

Berangkat dari ulasan di atas (fenomena empiris dan studi terdahulu) diperoleh penegasan posisi penelitian untuk menganalisis pelaksanaan program DD dalam upaya penanganan kemiskinan khususnya pada rumah tangga pesisir di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Studi difokus pada desa yang memiliki rumah tangga miskin terbanyak di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan pada tiga desa yakni Desa Mola Nelayan Bakti, Komala, dan Liya Togo. Analisis dilakukan untuk melahirkan tingkat efektivitas pelaksanaan program DD beserta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan dalam upaya penanganan kemiskinan.

2. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan desai kuantitatif yakni sistem skoring pada setiap instrumen analisis (kuantitatif tidak dalam pengertian menguji hipotesis). Sample yang selanjutnya disebut sengan informan ditentukan secara *purposive sampling* yang bersifat *snowball sampling* untuk merekomendasikan informan berikutnya yang dapat menjawab atau memiliki kualifikasi yang diinginkan. Desa yang dipilih sebagai objek studi adalah ditentukan secara *purposive* yakni desa yang memiliki jumlah keluarga miskin terbanyak di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yakni Desa Mola Nelayan Bakti, Komala, dan Liya Togo.

Penilaian efektivitas penggunaan dana desa dinilai berdasarkan program jangka pendek, dan program jangka menengah. Program jangka pendek dimaksud meliputi: bantuan pangan, bantuan perumahan (beda rumah), bantuan tunai, permodalan atau kredit mikro, bantuan alat produksi (pertanian, perikanan), dan bantuan kesehatan. Program jangka menengah meliputi: program bergulir, penguatan

kelembagaan, pengembangan sarana dan prasarana ekonomi desa, dan peningkatan SDM desa (Mukaddas et al., 2021).

Penilaian menggunakan pendekatan bobot dari tertinggi hingga terendah. Program jangka pendek tertinggi poin 5, dan terendah poin 1. Bobot untuk program jangka menengah untuk tertinggi 4, dan terendah 1 (Mukaddas et al., 2021; dan Murdiansyah, 2014). Adapun instrumen penilaian efektivitas penggunaan dana desa (DD) dalam pengentasan kemiskinan menurut jenis program disajikan pada Tabel 1 berikut,

Tabel 1. Pengukuran Efektifitas Penggunaan Dana Desa

No.	Program Pengentasan Kemiskinan	Bobot			Skor	Jumlah Skor
		Tahun				
		2016	2017	2018		
1.	Program bersifat jangka pendek					
	a. Bantua pangan dan gizi					
	b. Bantuan perumahan (bedah rumah)					
	c. Bantuan tunai, permodalan atau kredit mikro dan					
	d. Bantuan alat produksi (pertanian, perikanan)					
	e. Bantuan kesehatan					
	Total Skor					
	Skor Rata-Rata					
2.	Program jangka menengah/Panjang					
	a. Program bergulir					
	b. Penguatan kelembagaan					
	c. Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi desa					
	d. Peningkatan SDM desa					
	Total Skor					
	Skor Rata-Rata					
	Jumlah Total Skor Rata-Rata					

Sumber: Mukaddas et al., (2021); dan Murdiansyah, (2014)

Diakhir pembobotkan, maka diperoleh rentang skor pengukuran efektifitas penggunaan dana desa, yakni (Murdiansyah, 2014) yang terklasifikasi kedalam kategori tidak efektif, kurang efektif, cukup efektif, efektif, dan sangat efektif. Data penelitian sebagian bersumber dari sekunder yakni jawaban dari informan. Agar setiap jawaban diberikan kredibel, maka dilakukan uji (validasi internal) teknik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan bantuan *SPSS 23.0 for Windows*. Bila data kredibel, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

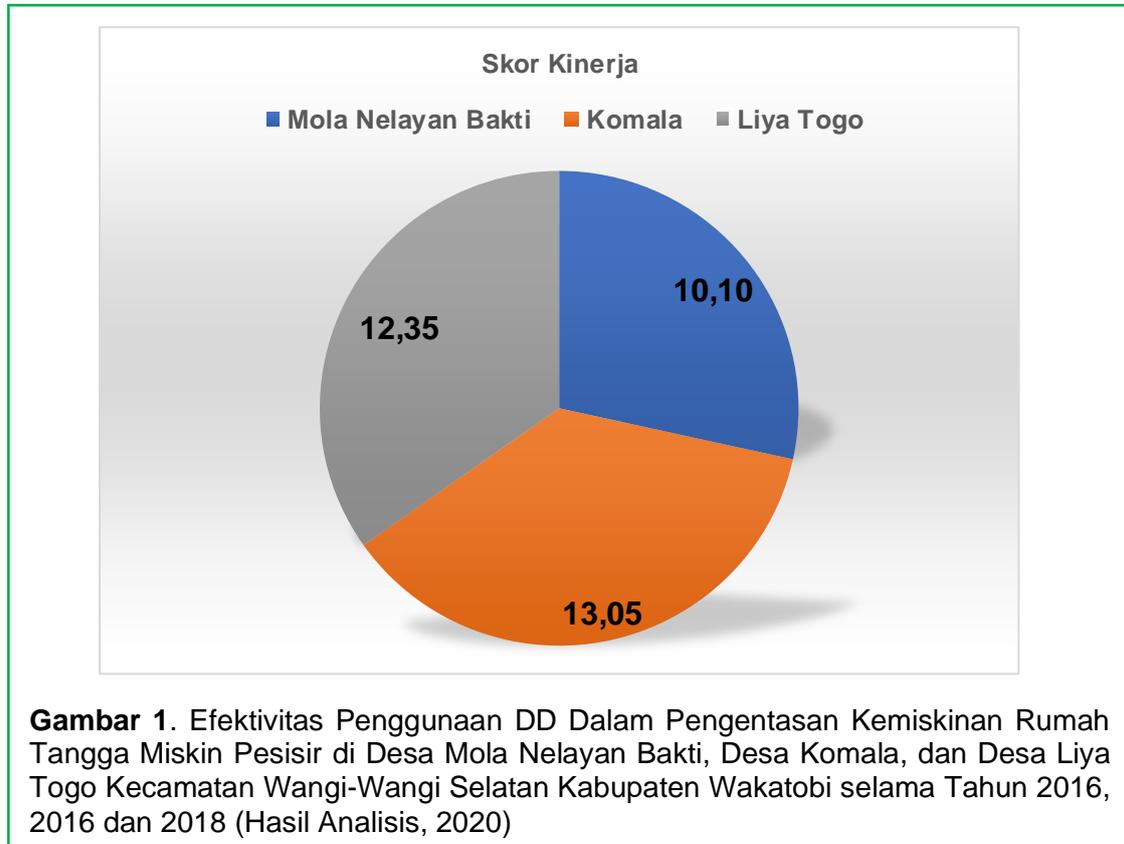
3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1 Efektifitas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan informasi yang diberikan informan diketahui skor efektivitas penggunaan DD selama tahun 2016, 2016 dan 2018 pada rumah tangga miskin pesisir kasus di Desa Mola Nelayan Bakti, Desa Komala, dan Desa Liya Togo Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi. Jumlah skor penilaian

pelaksanaan DD untuk pengentasan kemiskinan Desa Mola Nelayan Bakti adalah 10,10 (rerata dari program jangka pendek 13,20 dan jangka menengah 7,00). Skor tersebut lebih rendah dibanding kinerja di Desa Komala sebesar 13,05 (rerata dari program jangka pendek 18,60 dan jangka menengah 7,50). Skor penilaian kinerja pelaksanaan pembangunan desa dengan DD untuk kemiskinan di Desa Liya Togo sebesar 12,35, lebih baik dari Mola Nelayan Bakti, namun sedikit lebih rendah dari Desa Komala. Hasil analisis tersebut disajikan pada Gambar 1.



3.1.2. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Penggunaan DD dalam Penangan Kemiskinan di Rumah Tangga Pesisir

Berdasarkan hasil analisis (jawaban informan) diperoleh distribusi frekuensi jawaban informan terhadap variabel faktor pendukung efektivitas penggunaan dana desa (DD) dalam pengentasan kemiskinan sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2 di atas diperoleh skor rata-rata (rerata) sebesar 4.32.

Tabel 2. Frekuensi Jawaban Informan Terhadap Variabel Faktor Pendukung Efektivitas Penggunaan Dana Desa (DD) Dalam Pengentasan Kemiskinan

Item Indikator (Faktor Pendukung)	Skor								Jml Informan	Skor Rerata
	5		4		3		2/1			
	F	%	F	%	F	%	F	%		
Faktor Pendukung-1	20	60,61	13	39,39	-	-	-	-	33	4,61
Faktor Pendukung-2	16	48,48	17	51,52	-	-	-	-	33	4,48
Faktor Pendukung-3	16	48,48	12	36,36	5	15,15	-	-	33	4,33
Faktor Pendukung-4	11	33,33	15	45,45	7	21,21	-	-	33	4,18

Faktor Pendukung-5	15	45,45	13	39,39	5	15,15	-	-	33	4,30
Faktor Pendukung-6	11	33,33	12	36,36	10	30,30	-	-	33	4,03
Jumlah Skor Rata-Rata										4,32

Faktor pendukung dimaksud dalam penelitian merujuk dari Mukaddas et al., (2021); Listiyani & Argo (2016); dan Karimah et al., (2014) yakni: peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga tim pelaksana dapat melakukan tugasnya dengan baik (faktor pendukung-1), ketepatan kebijakan alokasi dana (faktor pendukung-2), perencanaan program yang tepat (faktor pendukung-3), ketepatan pelaksanaan (faktor pendukung-4), ketepatan target dan realisasi/capaian (faktor pendukung-5), dan partisipasi (keinginan) masyarakat (faktor pendukung-6).

Selanjutnya diperoleh skor yang merepresentasikan faktor penghambat (efektivitas) penggunaan dana desa (DD) dalam penanganan rumah tangga pesisir di Desa Mola Nelayan Bakti, Desa Komala dan Desa Liya Togo sebesar 4,14 sebagaimana disajikan pada Tabel 3. Kriteria yang digunakan mengukur faktor penghambat merujuk dari penelitian Mukaddas et al., (2021); Amin & Rusli (2017); Listiyani & Argo (2016); Karimah et al., (2014); dan Ferrara (2002) yakni budaya paternalistik (acuh) masyarakat (faktor penghambat-1), dominasi peran pemerintah desa (faktor penghambat-2), sumber daya manusia yakni pengelola, (faktor penghambat-3), partisipasi masyarakat yang rendah (faktor penghambat-4), dan keterbukaan informasi perencanaan (faktor penghambat-5).

Tabel 3. Frekuensi Jawaban Informan Terhadap Variabel Faktor Penghambat Efektivitas Penggunaan DD Dalam Pengentasan Kemiskinan

Item Indikator (Faktor Penghambatan)	Skor										Jml Informan	Skor Rerata
	5		4		3		2		1			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Faktor Penghambatan-1	13	39,39	14	42,42	6	18,18	-	-	-	-	33	4,21
Faktor Penghambatan-2	10	30,30	16	48,48	7	21,21	-	-	-	-	33	4,09
Faktor Penghambatan-3	11	33,33	15	45,45	7	21,21	-	-	-	-	33	4,12
Faktor Penghambatan-4	12	36,36	12	36,36	9	27,27	-	-	-	-	33	4,09
Faktor Penghambatan-5	14	42,42	11	33,33	8	24,24	-	-	-	-	33	4,18
Jumlah Skor Rata-Rata												4,14

Hasil selanjutnya adalah uji normalitas data faktor pendukung dan faktor penghambat efektifitas pengentasan kemiskinan melalui (DD) sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Uji Normalitas Data Teknik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,50813829
Most Extreme Differences	Absolute	,155
	Positive	,146
	Negative	-,155
Kolmogorov-Smirnov Z		,888
Asymp. Sig. (2-tailed)		,409

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data.

Nilai signifikansi (Asymp.Sig 2-tailed) sebesar 0,409. Karena signifikansi lebih dari 0,05 ($0,409 > 0,05$), maka nilai residual tersebut telah berdistribusi normal. Artinya bahwa analisis atas distribusi jawaban mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat pengentasan kemiskinan melalui DD terdistribusi secara normal.

Uji validitas akan menguji masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dimana keseluruhan variabel penelitian memuat 11 item pernyataan yang harus diisi oleh responden. Tingkat kepercayaan = 95% ($\alpha = 5\%$), derajat kebebasan ($df = n - 2 = 11 - 2 = 9$), didapat r tabel = 0,20. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai r positif, maka butir pernyataan dikatakan valid (ditunjukkan pada Tabel 5).

Tabel 5. Uji Validasi Variabel Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Efektivitas Pengentasan Kemiskinan

Variabel Penelitian	Indikator Variabel	Koefisien Korelasi (r)	r tabel	Sig.	Hasil
Faktor Pendukung (F.Pdk)	F.Pdk.1	0.2826	0,20	0,11	Valid
	F.Pdk.2	0.2826	0,20	0,001	Valid
	F.Pdk.3	0.2826	0,20	0,031	Valid
	F.Pdk.4	0.2826	0,20	0,000	Valid
	F.Pdk.5	0.2826	0,20	0,000	Valid
	F.Pdk.6	0.2826	0,20	0,001	Valid
Faktor Penghambat (F.Phbt)	F.Phbt.1	0.2826	0,20	0,000	Valid
	F.Phbt. 2	0.2826	0,20	0,022	Valid
	F.Phbt. 3	0.2826	0,20	0,022	Valid
	F.Phbt. 4	0.2826	0,20	0,019	Valid
	F.Phbt. 5	0.2826	0,20	0,000	Valid

Keterangan: F.Pdk (Faktor Pendukung)
F.Phbt (Faktor Penghambat)

Hasil analisis uji validitas variabel faktor pendukung dan faktor penghambat efektifitas pengentasan kemiskinan melalui (DD) memperlihatkan bahwa nilai r -hitung (0,2826) lebih besar ($>$) dari r -tabel (0,20) dan menunjukkan nilai r positif, artinya bahwa nilai tersebut dinyatakan valid.

Hasil uji reliabilitas dengan teknik *one spot* dengan alat bantu SPSS uji statistik *crobach alpha* (α) sebagaimana disajikan pada Tabel 6. Hasil ini menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan infroman dianggap kuat (reliabel) sehingga layak digunakan untuk kepentingan analisis. Suatu konstruk atau variabel dikatakan sangat reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* $> 0,06$ atau 0,41-0,70 reliabelnya (sedang). Hasil pengujian reliabilitas (Tabel 6) menunjukkan bahwa nilai koefisien *Alpha* dari variabel-variabel yang diteliti menunjukkan hasil yang beragam. Akan tetapi, semua item pernyataan faktor pendukung dan faktor penghambat efektifitas pengentasan kemiskinan melalui DD memiliki nilai koefisien *Alpha* lebih berada pada 0,41-0,70, yang artinya dapat dikatakan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliable (sedang).

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Efektivitas Pengentasan Kemiskinan

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritik	Kriteria Koefisien Reliabilitas
1.	Faktor pendukung (FPdk)	0,649	0,41-0,70	Reliabelnya Sedang
2.	Faktor penghambat (FPbt)	0,516	0,41-0,70	Reliabelnya Sedang

Hasil analisa selanjutnya adalah untuk mengetahui persentase faktor pendukung berdasarkan jawaban informan. Hasil tersebut disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Faktor Pendukung Efektivitas Penggunaan DD Dalam Pengentasan Kemiskinan

No	Indikator Faktor Pendukung	Frekuensi Informan (Orang)	(%)	Keterangan
1.	Peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga tim pelaksana dapat melakukan tugasnya dengan baik	9	27,27	Faktor pendukung
2.	Ketepatan kebijakan alokasi dana	7	21,21	Faktor pendukung
3.	Perencanaan program yang tepat	6	18,18	Faktor pendukung
4.	Ketepatan pelaksanaan	4	12,12	Bukan faktor pendukung
5.	Ketepatan target dan realisasi/capaian	5	15,15	Bukan faktor pendukung
6.	Partisipasi (keinginan) masyarakat	2	6,06	Bukan faktor pendukung
Jumlah		33	100	

Keterangan/Range =

<16,66 % (Bukan Faktor Pendukung)

>16,66 % (Faktor Pendukung)

Ada tiga faktor pendukung yang memiliki persentase >16,66% yakni peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga tim pelaksana dapat melakukan tugasnya dengan baik; ketepatan kebijakan alokasi dana; dan perencanaan program yang tepat.

Hasil analisis faktor penghambat efektivitas penggunaan DD dalam pengentasan kemiskinan sebagaimana disajikan pada Tabel 8. Ada tiga yang dianggap sebagai faktor penghambat yakni budaya paternalistik (acuh) masyarakat, partisipasi masyarakat (rendah), dan keterbukaan informasi perencanaan.

Tabel 8. Faktor Penghambat Efektifitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan

No	Indikator Faktor Pendukung	Frekuensi Informan (Orang)	(%)	Keterangan
1.	Budaya paternalistik (acuh) masyarakat	10	33,33	Faktor penghambat
2.	Dominasi peran pemerintah desa	3	9,09	Bukan faktor penghambat
3.	Sumberdaya manusia (pengelola)	5	15,15	Bukan faktor penghambat
4.	Partisipasi masyarakat (rendah)	7	21,21	Faktor penghambat
5.	Keterbukaan informasi perencanaan	8	24,24	Faktor penghambat
Jumlah		33	100	

Keterangan/Range=

<20 % (Bukan Faktor Penghambat)

>20 % (Faktor Penghambat)

3.2 Pembahasan

Implementasi pelaksanaan DD yang mengarah pada pengentasan kemiskinan di Desa Mola Nelayan Bakti dikategori “kurang efektif”, di Desa Komala “cukup efektif”, dan Desa Liya Togo “kurang efektif”. Cukup efektif bermula tidak baik (belum efektif), dengan demikian hasil ini mengkonfirmasi dugaan awal bahwa upaya pengentasan kemiskinan dengan beberapa instrumen kebijakan termasuk DD belum berkontribusi nyata terhadap pengentasan kemiskinan. Hasil ini sekaligus mendukung penelitian Mukaddas et al., (2021) bahwa program DD yang diarahkan pada pengentasan kemiskinan kurang dan cukup efektif. Konsekuensi logis dari hasil penelitian ini perlu ada evaluasi program-program yang direncanakan dimasa akan datang (RPJMDes) agar apa yang akan dilakukan tepat sasaran dan dapat diukur outputnya.

Poin kedua yang menjadi catatan dari kurang efektifnya pelaksanaan DD adalah mekanisme perencanaan agar dilakukan pendampingan perencanaan program. Menurut amatan peneliti, bahwa perencanaan selama ini dilakukan cenderung searah antara pemerintah desa dengan pendamping lokal desa. Menutupi kelemahan ini, perlu ada pelibatan ahli (pakar) untuk kepentingan analisis seberapa tepat, atau seberapa urgen program itu direncanakan serta metodologi pencapaian yang terukur.

Temuan berikutnya bahwa ada beberapa faktor yang dianggap baik dalam upaya penanganan (pengentasan) kemiskinan. Kasus ketiga desa yang dianalisis (Mola Nelayan Bakti, Komala, dan Liya Togo) polanya mirip yang ditandai dengan konsistensi faktor-faktor dimaksud. Faktor tersebut adalah *Pertama* peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga tim pelaksana dapat melakukan tugasnya dengan baik. *Kedua*, ketepatan kebijakan alokasi dana, dan *Ketiga* terletak dari perencanaan program yang tepat. Fakta ini berkesesuaian dengan penelitian Ridwan, (2012) bahwa keberhasilan program bantuan ditentukan oleh ketepatan sikap pengelola (dalam hal ini perangkat desa) dalam mengelola dana bantuan, serta ketepatan penentuan (perencanaan) bantuan.

Hal yang menjadi perhatian adalah faktor pendukung poin ketiga. Hasil pengamatan peneliti, ada sisi kelemahannya sebagaimana diungkap sebelumnya yakni prosesnya yang searah. Hal ini kemudian menjadi catatan perbaikan pelaksanaan program DD kedepan, tidak saja di pesisir namun diharapkan pada daerah lain.

Hasil penelitian terakhir yang berhasil diungkap adalah terdapat tiga (3) faktor yang menghambat pelaksanaan program DD yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Faktor tersebut adalah budaya paternalistik (acuh) masyarakat, kurang terbukanya (transparan) informasi perencanaan dan program, serta partisipasi masyarakat (rendah). Ketiga hal ini bukanlah hal baru sebab fakta ini hampir ditemukan diberapa wilayah sebagaimana diungkapkan oleh Mukaddas et al., (2021); Amin & Rusli (2017); Listiyani & Argo (2016); Karimah et al., (2014); dan Ferrara (2002). Konsekuensi teoritisnya bahwa ketiga faktor tersebut selalu menjadi kendala, uniknya adalah bersumber dari masyarakat miskin itu sendiri dan pemerintah. Hal ini memberi kesan bahwa ada “ketidakharmonisan” antara pemerintah sebagai pengelola kegiatan dengan masyarakat. Masyarakat seolah bertahan dengan karakternya (acuh, dan tidak ingin aktif berpartisipasi) yang

kemudian berkonsekuensi lahirnya persepsi ketidakpercayaan pada pengelola kegiatan (program DD). Persepsi yang cenderung kurang baik tersebut lahir sebagai manifestasi dari ketidakterbukaan pengelola DD (pemerintah desa). Perlu ada suatu terobosan pemikiran untuk menjembatani hal ini, bagi peneliti hal yang perlu dilakukan adalah transparansi pengelolaan keuangan dari hulu ke hilir, dimulai dari proses perencanaan hingga pelaporan penggunaan dana secara terbuka dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun (open akses).

4. Kesimpulan

Pelaksanaan program DD belum mengarah pada upaya penanganan (mengentaskan) kemiskinan (kurang efektif). Penyebabnya adalah budaya paternalistik (acuh) masyarakat, kurang terbuka (transparan) informasi perencanaan dan program, partisipasi masyarakat (rendah), ketidaktepat sasaran kegiatan; serta belum memenuhi target yang direncanakan.

Menutupi kelemahan pelaksanaan program DD untuk penanganan (pengentasan) kemiskinan pesisir perlu ada beberapa upaya. Perlu ada evaluasi program-program yang direncanakan dimasa akan datang (RPJMDes) agar apa yang akan dilakukan tepat sasaran dan dapat diukur outputnya. Poin kedua yang ditawarkan adalah perlu ada pelibatan ahli (pakar) untuk kepentingan analisis seberapa tepat, atau urgennya program tersebut direncanakan, serta metodologi pencapaian yang dapat diukur hasilnya. Terakhir adalah inovasi pemikiran pengelolaan program DD untuk menjembatani kesenjangan (persepsi) antara pengelola (pemerintah) dan masyarakat miskin terutama mengenai pengelolaan keuangan desa yang open akses.

Daftar Pustaka

- Alesina, A., & La Ferrara, E. (2000). Participation in Heterogeneous Communities*. *Quarterly Journal of Economics*, 115(3), 847–904. <https://doi.org/10.1162/003355300554935>
- Amin, M. M. & Rusli, Z. (2017). Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 Di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. *JOM FISIP*, 4(2), 1-15.
- Araujo, M. Caridad & Ferreira, Francisco H.G. & Lanjouw, Peter & Özler, Berk, (2008). "Local inequality and project choice: Theory and evidence from Ecuador," *Journal of Public Economics*, Elsevier, vol. 92(5-6), pages 1022-1046.
- Azwardi & Sukanto. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan; Journal of Economic & Development*, 12(1), 29 - 41.
- Ferrara, L.E. 2002. Inequality and Group Participation: Theory and Evidence From Rural Tanzania. *Journal of Public Economics*, 85(2): 235-273.
- Galasso, E., & Ravallion, M. (2005). Decentralized targeting of an antipoverty program. *Journal of Public Economics*, 89(4), 705–727. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2003.01.002>

- Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 597-602.
- Listiyani, R & Argo, P. 2016. Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. *Jurnal Elektronik e-Prints@UNY*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mahaeni, A., Sudibia, I. K., Wirathi, I., Rustariyuni, S. D., & Dewi, N. P. M. (2014). *Evaluasi Program-program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali. PIRAMIDA Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 10(1), 8-18.
- Mukaddas, J., Handa, I., & Hasddin, H. (2021). Efektivitas Program Dana Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Daerah 3T Di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 7(2), 251–259. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v7i2.1113>
- Murdiansyah, I. (2014). Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal WIGA*, 4(1), 71-92.
- Ngadi. (2016). Diversifikasi Mata Pencaharian Dan Pendapatan Rumah Tangga Di Kawasan Pesisir Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, *J. Sosek KP*, 11(2), 209-223.
- Park, A., & Wang, S. (2010). Community-based development and poverty alleviation: An evaluation of China's poor village investment program. *Journal of Public Economics*, 94(9–10), 790–799. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.06.005>.
- Pattinama, M. J. (2009). Poverty Reduction through Local Wisdom(A Case Study from Buru Island-Maluku and Surade-West Java). *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.7454/mssh.v13i1.195>.
- Ridwan, M. (2012). Penguatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kelompok. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 13(2), 207. <https://doi.org/10.23917/jep.v13i2.169>.
- Roidah, I. S. (2016). Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dalam Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita*, 39-55.